



MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA

Ilham Nurul Khoiri¹, Endang Murti², Agus Wiyaka³

Univeristas Merdeka Madiun^{1,2,3}

e-mail: ilhamnurulkhoiri@gmail.com

Diterima: 25/6/2026; Direvisi: 10/8/2026; Diterbitkan: 17/8/2026

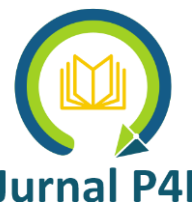
ABSTRAK

Tingginya kerentanan bencana hidrometeorologi di kawasan perkotaan menuntut penguatan kesiapsiagaan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kolaborasi antaraktor. Penelitian ini menganalisis implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (*Destana*) di Kelurahan Nambangan Kidul, Kota Madiun, guna memetakan pola hubungan kerja sama antara pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kelurahan, relawan, dan masyarakat. Kerangka analisis mengevaluasi empat dimensi *collaborative governance*, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Penelitian kualitatif studi kasus ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil evaluasi mengindikasikan bahwa pelaksanaan *Destana* berjalan cukup baik melalui pembagian peran, pelatihan kebencanaan, simulasi, dan pemanfaatan saluran komunikasi digital. Meskipun demikian, hambatan substantif masih ditemukan berupa keterbatasan anggaran operasional, ketiadaan standar operasional prosedur khusus tingkat kelurahan, serta partisipasi warga yang belum merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *collaborative governance* mampu memperkuat kesiapsiagaan komunitas lokal, namun keberlanjutannya memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan serta sinkronisasi koordinasi lintas sektor.

Kata kunci: *Collaborative Governance, Destana, Kesiapsiagaan, Mitigasi, Partisipasi.*

ABSTRACT

The high vulnerability to hydrometeorological disasters in urban areas demands the strengthening of community preparedness independently and sustainably through a collaboration-based approach among actors. This study analyzes the implementation of the Disaster Resilient Village/Sub-district (*Destana*) program in Nambangan Kidul Sub-district, Madiun City, to map the cooperative relationship patterns between the government, Regional Disaster Management Agency (BPBD), sub-district, volunteers, and the community. The analytical framework evaluates four dimensions of collaborative governance: starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. This qualitative case study research collected data through observation, in-depth interviews, and documentation, which were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The evaluation results indicate that the implementation of *Destana* has been running quite well through role division, disaster training, simulations, and the utilization of digital communication channels. Nevertheless, substantive obstacles remain, such as operational budget constraints, the lack of specific standard operating procedures at the sub-district level, and uneven community participation. This study concludes that collaborative governance is able to strengthen local community preparedness, although its sustainability requires institutional capacity building and cross-sectoral coordination synchronization.



Keywords: *Collaborative Governance, Destana, Mitigation, Participation, Preparedness.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerentanan bencana yang sangat tinggi di dunia (Imaduddina et al., 2023). Kondisi geografis Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia menjadikan wilayah ini rawan bencana (Imaduddina et al., 2023). Selain faktor geologis, risiko bencana juga meningkat akibat faktor demografis dan akumulasi degradasi lingkungan (Rachman et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana perlu diperkuat melalui mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat lokal (Rachman et al., 2025). Oleh karena itu, skema penanganan bencana harus bergeser dari reaktif menuju kuratif berbasis komunitas (Rachman et al., 2025).

Bencana menimbulkan kerugian materiil serta berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat (BNPB, 2012). Pengelolaan risiko bencana perlu diarahkan pada upaya membangun kapasitas masyarakat secara mandiri (BNPB, 2012). Badan Nasional Penanggulangan Bencana merancang program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagai solusi strategis (BNPB, 2012). Program ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mitigasi, kesiapsiagaan, hingga pemulihan pascabencana (BNPB, 2012). Pelaksanaan program ini menuntut adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen warga lokal (BNPB, 2012).

Pelaksanaan program kebencanaan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan lintas aktor secara terintegrasi (Ansell & Gash, 2008). Penanggulangan bencana merupakan persoalan publik kompleks yang tidak mungkin diselesaikan pemerintah saja (Ansell & Gash, 2008). Diperlukan kerja sama harmonis antara pemerintah daerah, relawan kebencanaan, dan masyarakat umum (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks ini, pendekatan *collaborative governance* menjadi sangat relevan untuk diterapkan (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan ini menekankan proses kerja sama antarpemangku kepentingan melalui komunikasi yang transparan (Ansell & Gash, 2008).

Kota Madiun memiliki potensi ancaman bencana hidrometeorologi yang terus meningkat setiap tahunnya (BNPB, 2025). Berdasarkan data *BPBD* Kota Madiun, frekuensi kejadian bencana mencatatkan angka yang cukup tinggi (BNPB, 2025). Sebagai contoh, pada periode tertentu tercatat 152 kejadian (BNPB, 2025). Peningkatan kejadian ini mempertegas pentingnya penguatan kesiapsiagaan di tingkat kelurahan (BNPB, 2025). Oleh sebab itu, intervensi kapasitas lokal menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah (BNPB, 2025).

Kelurahan Nambangan Kidul merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana (Portal Satu Data, 2025). Dalam pelaksanaan program *Destana*, terdapat keterlibatan berbagai pihak secara aktif di lapangan (Portal Satu Data, 2025). Namun demikian, praktik kolaborasi lintas aktor tidak selalu berjalan secara optimal (Emerson et al., 2012). Kendala utama mencakup keterbatasan koordinasi, hambatan sumber daya, serta ketimpangan partisipasi (Emerson et al., 2012). Kondisi dinamika lapangan ini memerlukan analisis mendalam terkait efektivitas tata kelola kolaboratif (Emerson et al., 2012).

Kondisi faktual menunjukkan adanya kesenjangan antara teori ideal dengan realitas di lapangan (Emerson et al., 2012). Secara ideal, program *Destana* seharusnya berjalan melalui kolaborasi yang kokoh dan terstruktur (Ansell & Gash, 2008). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan komunikasi antarlembaga dalam mencapai kesepakatan (Emerson et al., 2012). Oleh karena itu, kajian mengenai model *collaborative governance* menjadi penting dilakukan (Ansell & Gash, 2008). Kajian ini difokuskan untuk memetakan dinamika interaksi aktor serta hambatan operasionalnya (Ansell & Gash, 2008).

Berdasarkan paparan latar belakang, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *collaborative governance* pada *Destana* (Ansell & Gash, 2008). Penelitian ini mengambil lokasi spesifik di Kelurahan Nambangan Kidul, Kota Madiun (Portal Satu Data, 2025). Kajian diarahkan untuk memberikan rekomendasi konkrit bagi perbaikan tata kelola kebencanaan (Ansell & Gash, 2008). Hasil analisis diharapkan menjadi rujukan ilmiah bagi penguatan kapasitas kelembagaan lokal (BNPB, 2012). Kontribusi praktisnya adalah terciptanya model penanggulangan bencana yang inklusif dan berkelanjutan (Ansell & Gash, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai implementasi *Collaborative Governance* dalam program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Nambangan Kidul, Kota Madiun. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Nambangan Kidul karena wilayah ini merupakan salah satu kelurahan yang menjalankan program Desa Tangguh Bencana dan memiliki potensi kerentanan terhadap bencana, khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir. Fokus penelitian mengacu pada model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash, yang mencakup empat aspek utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Aspek tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kolaborasi antara pemerintah kelurahan, BPBD, masyarakat, dan aktor terkait lainnya berlangsung dalam pelaksanaan program *Destana*.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* (Moleong, 2017), yaitu aparat Pemerintah Kelurahan Nambangan Kidul, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, serta masyarakat yang aktif dalam program *Destana*. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa laporan kegiatan, arsip, foto, serta dokumen lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman, (2023), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan informasi dari aparat kelurahan, BPBD, dan masyarakat, serta mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Kelurahan Nambangan Kidul, Kota Madiun. Informan penelitian terdiri atas pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, Pemerintah Kelurahan Nambangan Kidul, serta masyarakat yang aktif dalam program *Destana*. Penyajian hasil penelitian mengacu pada model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash, yang meliputi empat aspek utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif.

1. Kondisi Awal

Pola keterlibatan para pihak sebelum dan sesudah pembentukan *Destana* disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Program Destana di Kelurahan Nambangan Kidul

Sumber: Arsip BPBD Kota Madiun, 2026

Berdasarkan gambar 1 kondisi awal dalam pelaksanaan Program Destana di Kelurahan Nambangan Kidul menunjukkan bahwa sebelum program berjalan, hubungan antaraktor sebenarnya telah terbentuk, khususnya ketika terjadi bencana atau kejadian darurat. Namun, hubungan tersebut masih bersifat spontan, belum terarah, dan belum memiliki pola koordinasi yang jelas. Setelah Program Destana dibentuk, koordinasi antaraktor menjadi lebih tertata melalui pelatihan, simulasi, forum komunikasi, grup WhatsApp, serta pembagian peran yang lebih jelas. Pak Bambang selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Madiun menyampaikan:

“Sebelum ada program Destana, sebenarnya BPBD, kelurahan, relawan, dan masyarakat sudah saling berhubungan kalau ada bencana. Tapi dulu masih jalan sendiri-sendiri dan belum ada cara penanganan yang jelas. Setelah ada Destana, koordinasinya jadi lebih rapi karena ada pelatihan, simulasi, grup WhatsApp, dan pertemuan rutin.”

(Wawancara, 6 Mei 2026)

Hal serupa disampaikan oleh Bapak F selaku Lurah Nambangan Kidul:

“Dulu sebelum Destana berjalan, untuk kerja sama antar BPBD, kelurahan, relawan, dan warga memang sudah ada, tapi belum terarah mas. Kalau ada kejadian biasanya langsung bergerak sendiri sesuai kemampuan masing-masing. Setelah Destana dibentuk, koordinasi jadi lebih teratur lewat pelatihan dan komunikasi rutin melalui grup WhatsApp untuk saling berbagi informasi.” (Wawancara, 5 Mei 2026)

Pak Mulyani selaku Ketua Relawan Destana juga menyampaikan:

“Sebelum program Destana ada, hubungan antar pihak sebenarnya sudah cukup baik, cuma penanganannya masih belum terkoordinasi dengan jelas. Seringnya masyarakat setempat yang sedang mengalami bencana bergerak sendiri sesuai kemampuan masing-masing. Setelah ada Destana, semua jadi lebih tertata gitu mas, karena ada pembagian peran, pelatihan, simulasi bencana, dan dibuatin grup Whatsapp supaya komunikasi lebih efektif.” (Wawancara, 29 April 2026)

Pada awal implementasi Destana, kepercayaan antaraktor mulai terbentuk melalui komunikasi aktif, pelatihan bersama, keterlibatan langsung dalam kegiatan kebencanaan, serta respons cepat dari BPBD dan kelurahan. Pak Mulyani menyampaikan:

“Awalnya kepercayaan itu muncul karena dari awal sudah diberi tau apa tujuan dibentuknya destana untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dan diberikan pelatihan, selain itu juga kami turun langsung saat kegiatan bencana. Kami merasa BPBD dan kelurahan cukup cepat memberi informasi dan bantuan, jadi masyarakat juga lebih percaya



diri untuk ikut membantu penanganan bencana di lingkungan.”

(Wawancara, 29 April 2026)

Pak Bambang menambahkan:

“Pada awal pelaksanaan Destana, kami membangun kepercayaan dengan masyarakat dan pihak kelurahan melalui komunikasi yang aktif dengan membutuhkan grup Whatsapp, pelatihan bersama, serta simulasi penanganan bencana. Kami juga memberikan ruang kepada relawan dan masyarakat untuk ikut terlibat langsung sesuai kemampuan masing-masing agar penanganan bencana bisa lebih cepat dan mandiri.”

(Wawancara, 6 Mei 2026)

Bapak F juga menjelaskan:

“Di awal program Destana, kepercayaan antar pihak mulai terbentuk karena masyarakat ternyata mempunyai kesadaran lingkungan yang tinggi. Dari kelurahan sendiri melihat BPBD cukup responsif dalam memberikan arahan dan pendampingan, sementara dari pihak kelurahan bertugas menjembatani antara BPBD dan masyarakat mas.”

(Wawancara, 5 Mei 2026)

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan kapasitas antaraktor. BPBD memiliki dukungan anggaran, fasilitas, SOP, dan kewenangan sebagai koordinator utama, sementara kelurahan dan relawan masih menghadapi keterbatasan peralatan, pendanaan operasional, serta kesiapan personel.

Pak Bambang menyampaikan:

“Memang ada perbedaan kapasitas antar pihak dalam penanganan bencana. Dari BPBD sendiri memiliki dukungan anggaran, fasilitas, SOP, serta kewenangan sebagai koordinator utama. Sementara di tingkat kelurahan dan relawan, masih ada keterbatasan terutama pada peralatan, pendanaan operasional, dan kesiapan personel karena para relawan juga punya pekerjaan masing-masing.” (Wawancara, 6 Mei 2026)

Bapak F juga menyatakan:

“Kalau dari sisi sumber daya memang masih ada perbedaan. BPBD lebih lengkap dari segi fasilitas, anggaran, maupun kemampuan penanggulangan bencana. Sedangkan di kelurahan dan relawan, kadang terkendala di biaya operasional, alat pendukung, dan kesibukan masing-masing anggota yang berbeda.” (Wawancara, 5 Mei 2026)

Sebelum adanya Destana, kerja sama lintas aktor telah dilakukan dalam penanganan kejadian seperti banjir dan pohon tumbang, tetapi sifatnya masih situasional. Pak Bambang menyampaikan:

“Sebelum program Destana dibentuk, sebenarnya koordinasi antar instansi dan masyarakat sudah pernah dilakukan saat ada kejadian seperti banjir, pohon tumbang, atau konflik sosial. Namun waktu itu sifatnya masih situasional dan belum ada pola koordinasi yang terstruktur. Setelah adanya Destana, kerja sama antar pihak jadi lebih jelas karena sudah ada sistem komunikasi, pelatihan, dan pembagian peran.” (Wawancara, 6 Mei 2026)

Bapak F juga menjelaskan:

“Dulu sebelum ada Destana, kalau terjadi bencana atau kejadian di lingkungan biasanya kelurahan, warga, dan pihak terkait langsung bergerak bersama. Tapi koordinasinya masih spontan dan belum punya aturan atau mekanisme yang jelas.” (Wawancara, 5 Mei 2026)

Berdasarkan temuan tersebut, kondisi awal pelaksanaan Destana di Kelurahan Nambangan Kidul menunjukkan adanya modal sosial yang tercermin dari hubungan awal antaraktor serta pengalaman kerja sama yang telah terbangun sebelumnya. Namun, hubungan tersebut masih bersifat informal dan belum terstruktur secara kelembagaan. Kehadiran Program Destana berperan dalam memperkuat pola koordinasi antaraktor, meningkatkan



kepercayaan, serta memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam upaya penanggulangan bencana secara kolaboratif.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan dalam Program Destana di Kelurahan Nambangan Kidul terlihat dari terbentuknya struktur kepengurusan, adanya forum koordinasi, penggunaan regulasi sebagai dasar pelaksanaan, serta adanya SOP dari BPBD sebagai pedoman kegiatan kebencanaan. Struktur kelembagaan Destana dibentuk melalui SK Kelurahan dengan pendampingan BPBD. Susunan pengurus terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.

Pak Andhi Bangkit Nusanto selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Trantibum Nambangan Kidul menyampaikan:

“Untuk struktur kepengurusan Destana dibentuk melalui SK dari kelurahan dengan pendampingan dari BPBD. Di dalamnya ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Untuk pengurus relawan atau KSB biasanya dipilih lewat musyawarah bersama atau voting dari perwakilan masing-masing wilayah.” (Wawancara, 5 Mei 2026)

Pak Mulyani juga menyampaikan:

“Pengurus Destana dibentuk secara resmi mas, ada SK kelurahan dan dibantu oleh BPBD, bahkan waktu itu pak wali juga datang. Susunannya ada ketua, sekretaris, bendahara, sama anggota lainnya. Kalau untuk pemilihan pengurus relawan biasanya dilakukan bareng-bareng lewat musyawarah atau pemungutan suara antar anggota.” (Wawancara, 29 April 2026)

Koordinasi antaraktor dilakukan melalui pertemuan langsung dan komunikasi melalui grup WhatsApp. Meskipun frekuensi pertemuan berkurang karena efisiensi anggaran, komunikasi tetap berjalan aktif.

Pak Bambang menjelaskan:

“Iya, ada. Koordinasi rutin biasanya dilakukan melalui pertemuan bersama pihak kelurahan, Linmas, relawan, dan unsur terkait lainnya. Sebelumnya untuk pertemuan dilakukan 4X dalam setahun, tapi karena ada efisiensi anggaran jadi diadakan 2X saja. Selain rapat langsung, komunikasi juga aktif dilakukan lewat grup WhatsApp untuk memudahkan penyampaian informasi dan koordinasi saat ada kejadian. Dari pemerintah kota juga ada call center melalui 112 untuk masyarakat jika mau menginformasikan adanya kejadian bencana.” (Wawancara, 6 Mei 2026)

Bapak F menyampaikan hal serupa:

“Ada mas, biasanya kami mengadakan koordinasi rutin dengan Linmas, relawan, RT/RW, dan pihak terkait lainnya. Dulu jadwal pertemuan 4X sekarang jadi 2X karena terkena efisiensi anggaran. Selain pertemuan langsung, sehari-hari komunikasi juga berjalan lewat grup WhatsApp supaya informasi lebih cepat tersampaikan. Selain itu Pemkot juga memberi layanan call center 112 mas.” (Wawancara, 5 Mei 2026)

Pelaksanaan Program Destana juga didukung oleh aturan formal, seperti Perwal Nomor 74 Tahun 2023, SK Kelurahan, SOP BPBD, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pak Bambang menyampaikan:

“Dalam pelaksanaan kegiatan Destana mengacu pada beberapa aturan, mulai dari Perwal Nomor 74 Tahun 2023, SK Kelurahan, SOP dari BPBD, sampai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain aturan resmi itu, di lapangan juga ada kesepakatan komunikasi dan koordinasi antar pihak supaya penanganan lebih cepat dan terarah.” (Wawancara, 6 Mei 2026)



Bapak F juga menyatakan:

“Kalau untuk kegiatan Destana sendiri dasarnya dari Perwal Nomor 74 Tahun 2023, SK Kelurahan, dan arahan SOP dari BPBD. Selain itu juga mengacu pada aturan penanggulangan bencana yang berlaku. Di lapangan biasanya kami juga punya kesepakatan bersama soal komunikasi dan koordinasi antar anggota supaya kerja sama lebih lancar.” (Wawancara, 5 Mei 2026)

Namun, di tingkat kelurahan belum tersedia SOP khusus yang dibuat secara mandiri. Pelaksanaan kegiatan masih mengacu pada SOP BPBD dan hasil koordinasi lapangan.

Pak Bangkit menyampaikan:

“Untuk penanganan bencana sebenarnya sudah ada SOP dari BPBD yang kami gunakan sebagai pedoman bersama. Tapi kalau di tingkat kelurahan sendiri memang belum ada SOP khusus yang dibuat tersendiri, jadi selama ini kami masih mengacu pada arahan dari BPBD dan hasil koordinasi di lapangan.” (Wawancara, 5 Mei 2026)

Pak Mulyani juga mengatakan:

“Kalau soal penanganan bencana, biasanya kami mengikuti SOP dari BPBD. Di kelurahan belum ada aturan khusus sendiri, jadi pelaksanaannya lebih banyak menyesuaikan arahan dari BPBD.” (Wawancara, 29 April 2026)

Dukungan kebijakan daerah juga menjadi dasar penting dalam pelaksanaan Destana. Pak Bambang menjelaskan:

“Pelaksanaan program Destana didukung oleh regulasi yang sudah jelas, seperti Perwal Nomor 74 Tahun 2023, aturan dari BPBD Kota Madiun, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Aturan-aturan ini menjadi dasar dalam pembentukan Destana, pelaksanaan pelatihan, sampai koordinasi dengan lintas sektor.” (Wawancara, 6 Mei 2026)

Pak Bangkit juga menyampaikan:

“Ada mas, dukungan aturan dari pemerintah daerah, termasuk Perda Nomor 74 Tahun 2023 dan aturan dari BPBD.” (Wawancara, 5 Mei 2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan Program Destana di Kelurahan Nambangan Kidul telah terbentuk cukup baik melalui struktur organisasi, regulasi, forum koordinasi, dan pembagian peran antaraktor. Namun, masih terdapat kelemahan pada belum tersedianya SOP khusus di tingkat kelurahan. Meski demikian, SOP BPBD tetap menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kegiatan kebencanaan.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif dalam pelaksanaan Program Destana di Kelurahan Nambangan Kidul dijalankan oleh BPBD sebagai koordinator utama dan pemerintah kelurahan sebagai penghubung antara masyarakat, relawan, dan OPD terkait. Kepemimpinan ini tidak bersifat otoriter, tetapi lebih menekankan pada koordinasi, komunikasi, fasilitasi, dan penyelesaian masalah secara musyawarah.

Pak Mulyani menyampaikan:

“Yang paling kami rasakan, BPBD itu yang pegang kendali besar dalam program Destana ini.” (Wawancara, 29 April 2026)

Bapak F menyatakan:

“Kami di kelurahan berperan sebagai jembatan antara masyarakat, para relawan, dan OPD terkait dalam pelaksanaan Destana. Dalam koordinasi ini, kami selalu bersinergi dengan BPBD selaku mitra utama agar program berjalan lancar hingga ke tingkat warga.” (Wawancara, 5 Mei 2026)

Pak Bambang juga menjelaskan:



“Jadi gini mas, dalam implementasi Destana, BPBD menjalankan fungsi koordinasi utama untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai standar. Sementara itu, pihak kelurahan memiliki peran strategis sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat, relawan, dan OPD terkait di lapangan.” (Wawancara, 6 Mei 2026)

Dalam menghadapi perbedaan pendapat atau miskomunikasi, aktor pelaksana lebih mengutamakan musyawarah, komunikasi langsung, dan koordinasi lintas sektor.

Bapak F menyampaikan:

“Kalau ada perbedaan pendapat atau miskomunikasi antar pihak, kami di kelurahan lebih mengutamakan pendekatan musyawarah dan komunikasi langsung. Untuk menjaga situasi tetap kondusif di masyarakat, kami juga aktif berkoordinasi dengan Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP, dan BPBD agar setiap potensi konflik bisa ditangani bersama sebelum berkembang lebih jauh.” (Wawancara, 5 Mei 2026)

Pak Bambang juga mengatakan:

“Setiap kendala koordinasi yang muncul dalam pelaksanaan program kami selesaikan melalui komunikasi langsung dan koordinasi lintas sektor antar instansi terkait.” (Wawancara, 6 Mei 2026)

Komunikasi antaraktor dijaga melalui grup WhatsApp, koordinasi langsung, dan evaluasi setelah kejadian bencana.

Bapak F menyampaikan:

“Kami menjaga komunikasi dengan semua pihak lewat grup WhatsApp yang aktif dan koordinasi langsung kalau ada hal mendesak. Setelah kejadian bencana pun kami selalu lakukan evaluasi bersama supaya ke depannya respons bisa lebih cepat dan informasi sampai ke semua pihak tanpa ada yang terlewat.” (Wawancara, 5 Mei 2026)

Pak Bambang juga menyampaikan:

“Untuk memastikan koordinasi antar-aktor berjalan efektif, kami membuat sistem komunikasi berupa grup WhatsApp aktif hingga evaluasi pasca kejadian bencana. Hal ini terbukti mempercepat arus informasi dan respons di lapangan, sehingga setiap pihak dapat bergerak lebih terkoordinasi saat situasi darurat terjadi.” (Wawancara, 6 Mei 2026)

Bentuk dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan program meliputi pelatihan, simulasi kebencanaan, penyusunan SOP, penyediaan fasilitas, serta arahan teknis di lapangan.

Pak Mulyani menyampaikan:

“Kami warga merasa terbantu dengan adanya pelatihan dan simulasi yang diadakan, jadi kalau terjadi bencana kami sudah punya gambaran harus berbuat apa. Perlengkapan dan fasilitas juga disediakan, a nada arahan langsung dari petugas jadi kami tidak bingung di lapangan.” (Wawancara, 29 April 2026)

Pak Bambang menjelaskan:

“Dukungan teknis merupakan bagian penting dari peran kami dalam penguatan kapasitas masyarakat. BPBD dalam hal ini memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan, simulasi kebencanaan, penyusunan SOP, serta penyediaan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan, sekaligus memberikan arahan teknis langsung di lapangan agar seluruh elemen siap menghadapi situasi darurat.” (Wawancara, 6 Mei 2026)

Bapak F juga menyampaikan:

“Kami di kelurahan berusaha memastikan warga dan relawan mendapat bekal yang cukup, mulai dari pelatihan, simulasi, hingga arahan langsung di lapangan dan untuk fasilitas



serta perlengkapan kami koordinasikan bersama BPBD agar kebutuhan di lapangan bisa terpenuhi." (Wawancara, 5 Mei 2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif dalam Program Destana dijalankan melalui pembagian peran antara BPBD dan kelurahan. BPBD berperan sebagai koordinator teknis, sedangkan kelurahan berperan sebagai penghubung komunikasi dengan masyarakat. Pola ini sesuai dengan konsep *Collaborative Governance* Ansell dan Gash yang menempatkan pemimpin sebagai fasilitator, mediator, dan penggerak kolaborasi.

4. Proses Kolaboratif

Proses kolaboratif dalam pelaksanaan Program Destana di Kelurahan Nambangan Kidul berlangsung melalui rapat rutin, pelatihan, simulasi kebencanaan, koordinasi langsung, komunikasi melalui grup WhatsApp, serta evaluasi pasca kejadian bencana. Proses ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar dijalankan dalam praktik lapangan.

Pak Bambang menyampaikan:

"Untuk proses diskusi dan dialog antar-aktor kami fasilitasi melalui berbagai forum, mulai dari rapat rutin, pelatihan, simulasi kebencanaan, hingga evaluasi pasca kejadian bencana. Koordinasi langsung di lapangan maupun di tingkat kelurahan juga kami pastikan berjalan secara konsisten agar setiap pihak memiliki pemahaman yang sama dan dapat bergerak secara sinergis." (Wawancara, 6 Mei 2026)

Pak Mulyani juga menyampaikan:

"Kami warga biasanya ketemu dan ngobrol bareng pas ada rapat rutin, pelatihan, atau waktu simulasi bencana. Dari situ kami jadi lebih paham situasi dan bisa langsung tanya atau sampaikan pendapat ke petugas yang ada di lapangan maupun di kelurahan." (Wawancara, 29 April 2026)

Kepercayaan antaraktor dibangun melalui komunikasi intensif, keterlibatan bersama dalam kegiatan, serta respons cepat saat terjadi bencana.

Pak Bambang mengatakan:

"Kepercayaan antar-aktor kami bangun secara konsisten melalui komunikasi yang intensif dan keterlibatan bersama dalam setiap kegiatan pelatihan maupun penanganan bencana di lapangan. Respons yang cepat dan terkoordinasi saat terjadi kejadian di masyarakat juga menjadi bagian penting dari upaya kami untuk menunjukkan bahwa setiap pihak dapat saling diandalkan dalam situasi apapun." (Wawancara, 6 Mei 2026)

Pak Bangkit menyampaikan:

"Kami bangun pelan-pelan kepercayaan lewat komunikasi yang rutin dan terbuka dengan semua pihak, khususnya lewat grup Whatsapp yang sudah ada. Ketika ada kejadian di masyarakat, kami juga selalu berusaha hadir dan merespons dengan cepat." (Wawancara, 5 Mei 2026)

Pak Mulyani juga menyatakan:

"Kami jadi percaya sama petugas dan relawan karena memang terasa nyata, pas ada kejadian mereka cepat datang dan sigap. Ditambah lagi komunikasi lewat grup Whatsapp sangat aktif, jadi lama-lama sudah kenal dekat dan tidak canggung lagi kalau harus kerja sama waktu ada bencana." (Wawancara, 29 April 2026)

Komitmen setiap aktor tampak dari keterlibatan BPBD sebagai koordinator, kelurahan sebagai penghubung wilayah, serta masyarakat dan relawan yang mengikuti pelatihan, simulasi, ronda, dan penanganan bencana secara sukarela.

Pak Bambang menyampaikan:



"Kalau kami lihat di lapangan, komitmen semua pihak itu nyata. BPBD siap di posisi koordinator, kelurahan aktif mengurus koordinasi wilayahnya, dan masyarakat sama relawan juga mau ikut pelatihan, simulasi, ronda, sampai penanganan bencana dengan sukarela. Itu yang membuat program ini bisa berjalan." (Wawancara, 6 Mei 2026)

Bapak F juga menyatakan:

"Kami di kelurahan selalu berusaha aktif dalam setiap koordinasi wilayah. Dan yang bikin kami senang, warga sama relawan di sini juga antusias, mereka mau ikut pelatihan, ronda, simulasi, bahkan turun langsung waktu ada bencana, semua secara sukarela tanpa harus dipaksa. Dari sini kita jadi tau kalau warga sudah mempunyai kesadaran lingkungan yang tinggi." (Wawancara, 5 Mei 2026)

Dalam pengambilan keputusan, musyawarah menjadi mekanisme utama pada kondisi normal. Namun, saat kondisi darurat, BPBD mengambil keputusan utama berdasarkan asesmen lapangan.

Pak Mulyani menyampaikan:

"Biasanya kalau ada hal penting, kami diajak rembukan dulu sama pihak kelurahan dan petugas. Tapi waktu bencana beneran terjadi, ya kami ikut arahan BPBD, karena mereka yang paling tahu kondisi di lapangan dan apa yang harus dilakukan." (Wawancara, 29 April 2026)

Pak Bambang menyampaikan:

"Dalam kondisi normal, setiap keputusan penting kami hasilkan melalui koordinasi bersama dan musyawarah antar pihak. Namun saat situasi darurat, BPBD mengambil alih pengambilan keputusan utama berdasarkan hasil asesmen lapangan, karena dalam kondisi seperti itu kecepatan dan ketepatan keputusan adalah segalanya." (Wawancara, 6 Mei 2026)

Bapak F juga menyatakan:

"Untuk keputusan-keputusan penting dalam program, kami selalu duduk bersama dulu, tidak bisa diputuskan sendiri. Tapi kalau sudah masuk situasi darurat, kami percayakan ke BPBD karena mereka yang punya kapasitas dan data lapangan untuk menentukan langkah penanganan yang paling tepat." (Wawancara, 5 Mei 2026)

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran, keterlibatan masyarakat yang belum merata, perbedaan kesiapan antaraktor, dan lambatnya koordinasi lintas sektor.

Pak Bangkit menyampaikan:

"Tantangan yang kami rasakan di lapangan itu cukup beragam, mulai dari anggaran yang terbatas karena ada efisiensi anggaran dari pusat, warga yang kadang tidak bisa hadir karena sibuk kerja, sampai koordinasi lintas sektor yang kadang tidak secepat yang kami harapkan. Tapi kami terus berupaya mengatasinya dengan rajin berkomunikasi, mengadakan pelatihan rutin, dan koordinasi langsung ke OPD terkait supaya program tetap bisa berjalan." (Wawancara, 5 Mei 2026)

Pak Bambang juga mengatakan:

"Ada beberapa tantangan yang kami hadapi dalam pelaksanaan program ini. Keterbatasan anggaran karena terkena efisiensi, keterlibatan masyarakat yang belum merata karena kesibukan masing-masing, perbedaan kesiapan antar-aktor, hingga lambatnya koordinasi lintas sektor masih menjadi kendala nyata di lapangan. Untuk mengatasinya, kami terus mendorong komunikasi yang lebih intensif, pelatihan yang rutin, dan koordinasi langsung dengan OPD terkait agar setiap hambatan bisa diatasi bersama." (Wawancara, 6 Mei 2026)

Secara umum, pelaksanaan Destana dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, mempercepat koordinasi penanganan bencana, dan mendorong partisipasi warga.

Bapak F menyampaikan:

"Menurut kami, program Destana ini sudah cukup berhasil karena kami bisa melihat sendiri bagaimana warga sekarang jauh lebih siap dan sigap dibanding sebelumnya, dan koordinasi penanganan bencana pun terasa lebih cepat. Ke depannya kami berharap ada penambahan anggaran, sarana prasarana yang lebih memadai, supaya kolaborasi ini bisa semakin baik dan respons saat bencana makin cepat." (Wawancara, 5 Mei 2026)

Pak Mulyani menyatakan:

"Kami warga ngerasa program Destana ini manfaatnya nyata, kami jadi lebih tahu apa yang harus dilakukan kalau ada bencana dan ada banyak relawan yang siap membantu. Tapi kalau boleh berharap, semoga ke depannya pelatihan bisa lebih sering diadakan dan peralatan yang tersedia juga makin lengkap, biar kami makin siap dan tidak bingung waktu bencana datang." (Wawancara, 29 April 2026)

Pak Bambang menambahkan:

"Secara umum kami menilai pelaksanaan Destana sudah cukup efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan mempercepat koordinasi penanganan bencana, serta mendorong partisipasi aktif warga dan relawan di lapangan. Namun ke depannya masih perlu banyak peningkatan, terutama dari sisi anggaran, sarana prasarana, intensitas pelatihan, penguatan SOP di tingkat kelurahan, serta komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang lebih solid agar respons penanganan bencana bisa semakin cepat dan efektif." (Wawancara, 6 Mei 2026).

Kegiatan simulasi dan koordinasi program desa tangguh bencana disajikan pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Kegiatan Simulasi dan Koordinasi Program Desa Tangguh Bencana

Sumber: Arsip BPBD Kota Madiun, 2026

Berdasarkan gambar 2 tersebut, proses kolaboratif dalam Program Destana telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya dialog antaraktor, kepercayaan yang dibangun melalui kerja bersama, komitmen aktor dalam pelaksanaan kegiatan, serta pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah. Namun, keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan koordinasi lintas sektor masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki.

Pembahasan

Implementasi *collaborative governance* dalam Program Desa Tangguh Bencana (*Destana*) di Kelurahan Nambangan Kidul telah terbukti mampu menjawab permasalahan keterbatasan kapasitas pemerintah dalam penanggulangan bencana lokal. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa seluruh dimensi kolaborasi telah berjalan, meskipun berada pada tingkat efektivitas yang bervariasi. Kerja sama terpadu antara BPBD, kelurahan, relawan, dan masyarakat secara empiris meningkatkan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Temuan ini selaras dengan studi dasar yang menegaskan bahwa



keberhasilan penataan kebijakan publik yang kompleks sangat bergantung pada efektivitas interaksi antaraktor di lapangan (Ansell & Gash, 2008; Alhadi et al., 2026; Ilham & Alhadi, 2025; Royani & Agusna, 2025; Sasmito et al., 2026).

Pada dimensi kondisi awal, terbentuknya modal sosial berupa kepercayaan dan jaringan komunikasi pra-bencana menjadi fondasi utama keberhasilan kolaborasi. Kehadiran program *Destana* mentransformasi pola interaksi reaktif yang semula bersifat spontan menjadi tata kelola yang terencana dan terukur. Integrasi relawan ke dalam sistem informasi kebencanaan terbukti mempercepat arus komunikasi darurat saat debit air meningkat. Kondisi ini memperkuat kajian terdahulu yang menyatakan bahwa modal sosial awal dan komitmen bersama merupakan syarat mutlak dalam membangun tata kelola kebencanaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan (McNaught, 2024; Lestari et al., 2024; Savari et al., 2024; Susanti et al., 2025; Wicaksana et al., 2025).

Desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif memainkan peran penting dalam menjaga kepastian hukum serta keberlangsungan forum kolaboratif. Keberadaan regulasi daerah dan *SK* Kelurahan memberikan legitimasi kuat bagi pergerakan relawan *FPRB* di tingkat akar rumput. Selain itu, gaya kepemimpinan *BPBD* yang bersifat mengayomi serta peran kelurahan sebagai jembatan komunikasi terbukti efektif menekan potensi konflik antaraktor. Temuan ini mendukung sintesis teori yang menyatakan bahwa kepemimpinan fasilitatif berfungsi sebagai katalisator untuk meredam ketimpangan kapasitas antarlembaga dalam sebuah forum kolaborasi (Emerson et al., 2012; Mardiyanta & Ermawan, 2023; Priadi, 2024; Punjabi et al., 2026; Zaki et al., 2025).

Meskipun proses kolaboratif telah menghasilkan dampak positif terhadap kesiapsiagaan warga, penelitian ini menemukan sejumlah hambatan struktural yang berpotensi menurunkan kinerja program. Keterbatasan alokasi anggaran operasional, ketidakteraturan jadwal pelatihan akibat kendala efisiensi, serta ketiadaan *SOP* khusus tingkat kelurahan menjadi tantangan serius bagi kemandirian *Destana*. Ketimpangan partisipasi masyarakat akibat kesibukan ekonomi juga menunjukkan bahwa pelebagaan nilai-nilai mitigasi belum merata. Masalah keterbatasan sumber daya ini konsisten dengan hasil penelitian tata kelola publik di berbagai wilayah berkembang (Napir, 2019).

Secara komparatif, implementasi *Destana* di Kelurahan Nambangan Kidul telah memenuhi kriteria dasar *collaborative governance*, tetapi masih memerlukan penyempurnaan pada aspek kemandirian tata kelola. Ketergantungan yang tinggi terhadap instruksi teknis dan fasilitas *BPBD* mengindikasikan bahwa kelurahan belum sepenuhnya mencapai tingkat ketangguhan mandiri. Untuk mengoptimalkan kinerja kolaborasi, penguatan regulasi lokal berupa penyusunan *SOP* kelurahan serta diversifikasi pendanaan berbasis kemitraan swasta menjadi kebutuhan yang mendesak. Temuan ini memperkuat urgensi adaptasi mekanisme kolaborasi agar relevan dengan dinamika serta kebutuhan riil masyarakat lokal (Newig et al., 2018).

KESIMPULAN

Implementasi Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (*Destana*) di Kelurahan Nambangan Kidul, Kota Madiun, secara umum telah mencerminkan penerapan *collaborative governance* yang efektif berdasarkan empat dimensi Ansell dan Gash. Kehadiran program ini berhasil mengubah pola penanganan bencana yang semula bersifat spontan dan reaktif menjadi lebih terkoordinasi melalui pembentukan forum komunikasi, pelatihan rutin, simulasi lapangan, serta pembagian peran yang jelas antaraktor. Kepemimpinan fasilitatif yang dijalankan oleh *BPBD* sebagai pendamping teknis dan



kelurahan sebagai mediator masyarakat mampu membangun kepercayaan serta komitmen bersama di tingkat lokal. Meskipun demikian, efektivitas kolaborasi ini masih terhambat oleh keterbatasan anggaran operasional, belum tersedianya *SOP* khusus di tingkat kelurahan, serta tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata akibat kesibukan kerja. Secara keseluruhan, model tata kelola kolaboratif ini telah terbukti meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas adaptif warga dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologi.

Guna menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kemandirian Program *Destana* di Kelurahan Nambangan Kidul, beberapa langkah strategis perlu direkomendasikan kepada pihak terkait. Pertama, Pemerintah Kelurahan Nambangan Kidul bersama *FPRB* harus segera menyusun *SOP* penanganan darurat yang mandiri dan kontekstual sesuai dengan karakteristik kerentanan wilayah setempat. Kedua, *BPBD* dan pemerintah daerah perlu mengupayakan diversifikasi skema pendanaan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan dana kelurahan serta mengoptimalkan program *corporate social responsibility* (*CSR*) dari sektor swasta guna menyokong keberlanjutan pelatihan dan pemenuhan sarana mitigasi. Ketiga, pengurus *Destana* perlu memperluas jangkauan edukasi kebencanaan hingga tingkat RT/RW dengan menyesuaikan waktu kegiatan pelatihan pada akhir pekan agar partisipasi warga dapat terwujud secara lebih inklusif dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadi, Z., Permana, I., Putera, R. E., Eriyanti, F., Yusran, R., Hidayat, R., Fajri, H., & Riandini, O. (2026). Policy capacity and local disaster management effectiveness: Assessing institutional performance in Rokan Hulu Regency, Indonesia. *International Journal of Safety and Security Engineering*, 16(1), 29–42. <https://doi.org/10.18280/ijssse.160103>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- BNPB. (2012). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BNPB. (2025). *Infografis peta sebaran penanganan kejadian bencana wilayah Kota Madiun tahun 2025*. BPBD Kota Madiun.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Ilham, F., & Alhadi, Z. (2025). Peran pemerintah dalam mitigasi bencana banjir bandang di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam. *Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik*, 9(2), 89–98. <https://doi.org/10.24036/jtrap.v9i2.167>
- Imaduddina, A. H., Widodo, W. H. S., & Sasongko, I. (2023). Kajian kerentanan bencana gempa bumi berdasarkan perspektif multitemporal. *Prosiding SEMSINA*, 45–52. <https://doi.org/10.1234/semsina.v2023.2023>
- Lestari, L. W., Qibtiyah, N. D. M. A., Nugraha, I. C., Qibtiyah, M., & Shafira, S. (2024). Mitigasi bencana banjir melalui normalisasi Daerah Aliran Sungai Beringin dan pemanfaatan flood early warning system di Kelurahan Mangkang Wetan. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 19(1), 211. <https://doi.org/10.20961/region.v19i1.65726>



- Mardiyanta, A., & Ermawan, D. (2023). Gray area between policy success and failure: Assessing the degree of success of Law Number 7 of 2016 in the salt industrialization program in West Nusa Tenggara Province. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 36(1), 156–171. <https://doi.org/10.20473/mkp.v36i12023.156-171>
- McNaught, R. (2024). The application of collaborative governance in local level climate and disaster resilient development – A global review. *Environmental Science and Policy*, 151, Article 103627. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.103627>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2023). *Qualitative data analysis*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Napir, S. (2019). Model collaborative governance dalam pelaksanaan program Desa Online di Kabupaten Pohuwato. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 5(2), 41–50. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v5i2.404>
- Newig, J., Challies, E. D., Jager, N. W., Kochskaemper, E., & Adzersen, A. (2018). The environmental performance of participatory and collaborative governance: A framework of causal mechanisms. *Policy Studies Journal*, 46(2), 269–297. <https://doi.org/10.1111/psj.12209>
- Portal Satu Data. (2025). *Data kejadian bencana Kota Madiun*. Pemerintah Kota Madiun.
- Priadi, A. (2024). Model of collaborative governance in housing provision (Study on social rehabilitation program of uninhabitable houses in Prabumulih City South Sumatra Province). *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i18.16352>
- Punjabi, S., Misra, S., Rippey, M. A., & Grant, S. B. (2026). Collaborative communities, brokers, and integrators in a convergence research team: A social network analysis. *Minerva*. <https://doi.org/10.1007/s11024-026-09643-0>
- Rachman, M. G., Zelvany, Z. T., & Favali, F. E. (2025). Analisis risiko kebencanaan Indonesia untuk mendukung kebijakan publik. *Journal of Infrastructure Policy and Management*, 8(1), 12–24. <https://doi.org/10.1234/jipm.v8i1.2025>
- Royani, N., & Agusna, P. (2025). Kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan masyarakat dalam menanggulangi bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 109–130. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v7i2.5426>
- Sasmito, L., Supranoto, Indriastuti, S., Prayitno, H., & Sawir, M. (2026). From symbolic compliance to strategic action: Local governance and the implementation of Indonesia's stunting reduction policy. *SN Social Sciences*, 6(5). <https://doi.org/10.1007/s43545-026-01448-y>
- Savari, M., Jafari, A. J., & Sheheytavi, A. (2024). The impact of social capital to improve rural households' resilience against flooding: Evidence from Iran. *Frontiers in Water*, 6. <https://doi.org/10.3389/frwa.2024.1393226>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, R., Hidir, A., Kadarisman, Y., Widodo, T., Risdaryati, & Amin, M. L. (2025). Community social capital as a strategy to reduce the risk of flood disasters in Pelalawan Regency. *SOSIOEDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 14(4), 3997–4008. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i4.6945>
- Wicaksana, G. T., Mulyono, J., & Arifiyanti, J. (2025). Modal sosial dalam mitigasi struktural banjir: Studi kasus forum pengurangan risiko bencana di DAS Kalijompo. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 8(2), 218. <https://doi.org/10.30829/jisa.v8i2.25630>



- Zaki, A. S., Safoora, A., Sajid, I., & Hassan, Z. (2025). Leading through facilitation: Transforming collaboration, trust, and change readiness in Maldivian institutions. *International Journal of Social Science and Human Research*, 8(11). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i11-87>